

TINJAUAN DESKRIPTIF NASIONALISASI N.V. O.G.E.M. DI TANDJUNGKARANG-TELUKBETUNGTAHUN 1959

Eko Susanto, Wakidi dan M. Basri

FKIP UnilaJalan. Prof. Dr. SoemantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

*e-mail:*ekosusanto49@yahoo.co.id

Hp. 08992286867

The purpose of this study to determine the process of nationalization of electricity companies OGEM Tandjungkarang-Telukbetung in 1959. The method used is the historical method of data collection techniques through library research techniques, interviews, documentation and observation. Techniques of data analysis is qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study, the height of the takeover of Dutch utility company occurred in 1957. Nationalization process N.V. O.G.E.M. promulgated on December 27, 1958, is inseparable from the role of President Soekarno, leader electric company in Jakarta; Ir. Srigati Santoso, electricity officials, chaired by Kobarsih center that sparked the nationalization of electricity in these areas, in addition to the role of head of regional electricity company Southern Sumatra; Kusuma RWS electrical workers who are members of the Trade Union of Electricity and Gas in Indonesia, especially in Tandjungkarang-Telukbetung chaired by Soedarto, also the role of the army acting company maintain a stable security measures to avoid the possibility of the communists who are members of the PKI.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses nasionalisasi perusahaan listrik O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, puncak tindakan pengambilalihan perusahaan listrik Belanda terjadi tahun 1957. Proses nasionalisasi N.V. O.G.E.M. yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1958, tidak terlepas dari peran serta Presiden Soekarno, pimpinan perusahaan listrik pusat di Jakarta; Ir. Srigati Santoso, para pegawai listrik pusat yang diketuai oleh Kobarsih yang mencetuskan terjadinya nasionalisasi perusahaan listrik di daerah-daerah, selain itu peran serta pimpinan perusahaan listrik daerah Sumatera Bagian Selatan; Kusuma R.W.S. para pekerja kelistrikan yang tergabung dalam Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia khususnya di Tandjungkarang-Telukbetung yang diketuai oleh Soedarto, juga peran serta angkatan darat yang bertindak menjaga keamanan perusahaan, menghindarkan kemungkinan adanya tindakan kalangan komunis yang tergabung dalam PKI.

Kata kunci: nasionalisasi, n.v. o.g.e.m., tandjungkarang, telukbetung

PENDAHULUAN

Hingga saat ini listrik menjadi salah satu hal pokok pendukung kehidupan. Listrik di Indonesia yang kini dikelola oleh sebuah perusahaan monopolistik bernama Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebenarnya adalah warisan dari pemerintah Kolonial Belanda. Proses pengambilalihan perusahaan listrik tersebut oleh bangsa Indonesia memiliki kisah tersendiri dan berbeda di tiap

daerah. Namun perbedaan tersebut pada intinya mengarah pada satu titik, yakni keinginan bangsa Indonesia untuk mengelola sendiri perusahaan peninggalan penguasa Eropa tersebut utamanya Belanda pada pasca kemerdekaan Indonesia.

Sejarah panjang kelistrikan di Indonesia berawal di akhir abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan

asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mulai mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Oleh karena itulah maka kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan mendukung keterlibatan penjajah yang semakin intensif untuk mencapai ketentraman, keadilan, modernitas dan kesejahteraan. Di tangan perusahaan-perusahaan swasta produksi komoditi daerah tropis meningkat dengan cepat dan tahun 1900 sampai 1930 produksi gula meningkat hampir empat kali lipat dan produksi teh meningkat hampir sebelas kali lipat (M.C. Ricklefs, 1991: 228-229).

Periode pertama, pada tahun 1924 sudah berdiri perusahaan swasta Belanda yang mengelola kelistrikan di kota Palembang, yaitu *N.V. Nederland Indische Gas en Electriciteit Maatschappij* yang disingkat N.V. N.I.G.E.M. yang memiliki mesin pembangkit tenaga listrik merk *sulzer* sebanyak 2 unit yang mulai dioperasikan pada tahun 1927 dan mempunyai anak perusahaan di Tanjung Karang yang mulai berdiri di tahun 1927 dan mulai dioperasikan tahun 1929 (<http://palembangdalamsketsa.blogspot.com/2012/05/gedunglistrikO.G.E.M.palembang.html>, 14 Desember 2012, 08:20).

Kemudian periode kedua antara tahun 1942-1945 pada masa pecahnya Perang Dunia II, dimana tentara Jepang banyak mendapat kemenangan dalam peperangan di Asia termasuk Indonesia dapat dikuasai Jepang, dengan demikian perusahaan listrik di kota Palembang dikuasai pula oleh Jepang dan diubah namanya menjadi *Denki Kyoky*.

Denki Kyoky tidak bertahan lama, sebab Jepang menyerah ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu. Selama dikuasai Jepang, kelistrikan di daerah Sumatera bagian Selatan tidak mengalami perkembangan kecuali di Tanjung Karang, di mana sentral pembangkit listrik yang diledakkan oleh Belanda dapat diperbaiki oleh Jepang. Belanda kembali masuk ke Indonesia dan perusahaan listrik *Denki Kyoky* diserahkan lagi kepada Belanda dengan nama N.V. O.G.E.M..

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih kembali menguasai dan mengelola beberapa sentra perekonomian modern yang ada di Indonesia hingga memasuki dekade 1950-an, termasuk salah satunya N.V. O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung. Terdapat lima perusahaan terkenal milik Belanda pada saat itu, yang sangat berpengaruh sebagai pendukung sendi perekonomian di Indonesia. Lima besar perusahaan Belanda yang disebut dengan *The Big Five*, yaitu: *Jacobson & van den Berg*, *Internatio*, *Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij)*, *Lindeteves* dan *Geo Wehry* (Muhaimin, dalam Bondan Kanumoyoso, 2001: xii). Kondisi yang demikian menunjukkan tidak terjadi banyak perubahan dalam struktur perekonomian di Indonesia, meskipun kemerdekaan telah diperoleh secara utuh.

Secara umum sifat kecenderungan yang muncul dan terjadi di beberapa negara yang baru terlepas dari belenggu kolonialisme, yakni sekitar pertengahan abad ke dua puluh, menghadapi masalah perekonomian yang sangat mendesak dan perlu dengan segera mendapat penanganan untuk diatasi. Masalah pokok tersebut secara umum, antara lain:

(1) tugas merehabilitasi perekonomian nasional yang telah mengalami kerusakan besar pasca pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan; (2) desakan masyarakat umum untuk merehabilitasi ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Pada awal 1950-an keadaan perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya ketimpangan antara harapan dengan kenyataan yang dihadapi. Harapan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagai hasil dari kedaulatan politik yang telah diperoleh tidak dapat diwujudkan dengan segera. Sejumlah permasalahan kesejahteraan, perbaikan keadaan dan struktur ekonomi nasional kembali muncul dalam bentuk yang lebih nyata.

Penasionalisasian perusahaan listrik bentukan Belanda tersebut secara tidak langsung dirintis oleh para pemuda dan buruh listrik dalam Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI) dan pada kelanjutannya menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana proses nasionalisasi N.V. *Overzeeche Gas en Electriciteit Maatschappij* (N.V. O.G.E.M.) di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959.

METODE PENELITIAN

Menurut Moh. Nazir, bahwa dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat memilih berbagai macam metode. Sudah pastimetode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan (2005:44). Hal tersebutlah yang memengaruhi keberhasilan dalam suatu penelitian. Maka dari itu seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Dengan metode sejarah, peneliti berusaha membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengevaluasi, mengumpulkan, memverifikasi, serta menyintesis bukti-bukti mengenai proses nasionalisasi N.V. O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959. Metode sejarah sebagai metode penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu *what, when, where, who, why* dan *how*. Oleh sebab itu, penelitian ini akan ditempuh dengan melakukan prosedur penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah bagian yang saling berurutan, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut: Heuristik (Kegiatan menghimpun jejak masa lampau), Kritik (Penyelidikan tentang kesejatan jejak, baik bentuk maupun isinya), Interpretasi (Menetapkan makna yang saling berhubungan dan fakta-fakta yang diperoleh), Historiografi (Menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah) (Louis Gostchalk, 1984: 36).

Variabel penelitian menurut Moh. Nazir (2005: 123), yakni suatu konsep yang memiliki berbagai macam nilai, sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2000: 72), yang dimaksud dengan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan

dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal yakni variabel yang kuat pengaruhnya untuk dapat berdiri sendiri, dengan fokus kajian pada proses nasionalisasi N.V. O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kepustakaan, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Koentjaraningrat (1983: 81), Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan misalnya koran, majalah-majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik kepustakaan, peneliti berusaha untuk mempelajari dan menelaah buku-buku guna memperoleh data-data dan informasi berupa teori-teori atau argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa proses nasionalisasi N.V. O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959.

Teknik wawancara menurut Hadari Nawawi (1993: 95), adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Melalui teknik ini penulis menggali informasi kepada informan/responden yang didasarkan pada permasalahan penulisan. Informan yang dipilih harus mempunyai pengalaman sesuai dengan latar penelitian. Seorang informan adalah orang yang jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk pada kelompok yang bertentangan dengan latar belakang penelitian dan memiliki pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Informan dalam penelitian ini memiliki kriteria-kriteria, seperti berikut:

(1) Pelaku yang memiliki pengetahuan tentang objek yang akan diteliti, yakni pengetahuan tentang perusahaan listrik yang ada di Tandjungkarang-Telukbetung, (2)

Informan/narasumber yang memiliki kesedian waktu yang cukup.

Teknik dokumentasi menurut Hadari Nawawi (1993: 95), adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Melalui teknik ini penulis mengumpulkan berbagai bahan baik berupa tulisan maupun gambar-gambar yang berkenaan dengan masalah yang peneliti bahas yakni proses nasionalisasi N.V. O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959.

Teknik observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penulisan yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi dan dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan alat (Hadari Nawawi, 1993: 94). Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah melihat secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati benda-benda peninggalan bangsa Belanda yang masih disimpan di kantor PLN Tandjungkarang-Telukbetung agar memperoleh data lebih mendalam dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi atau *content analysis* (Abdul Aziz S.R., dalam Jusuf Soewadji, 2012: 72). Menurut Jusuf Soewadji, teknik analisis isi adalah salah satu varian dari teknik analisis data kualitatif yang paling umum dan abstrak (2012: 72). Teknik ini mengutamakan proses dan isi komunikasi sebagai dasar dari ilmu sosial. Bersifat induktif karena analisis sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi semua simpulan yang dibuat sampai dengan teori yang mungkin dikembangkan dibentuk dari semua data yang telah berhasil ditemukan dan dikumpulkan di lapangan.

Menurut H.B. Sutopo (2006: 114), pada dasarnya proses analisis data dilakukan

secara bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Di bawah ini merupakan tahap-tahap dalam proses analisis data kualitatif tersebut, meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah dilangsungkan sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, mengajukan pertanyaan penelitian yang menekankan pada peristiwa nasionalisasi perusahaan listrik O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung. Teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data yang akan digali dan jenis data ini sudah terarah dan ditentukan oleh beragam pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Setelah data-data tentang nasionalisasi perusahaan listrik O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959 telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh, setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara rinci, tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan data terkait nasionalisasi perusahaan listrik O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959 yang didapat dari buku-buku yang digunakan sebagai referensi pendukung dalam pembahasan.
2. Menggolongkan data pembahasan mengenai nasionalisasi perusahaan listrik O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959 berdasarkan data pendukung yang diperoleh.
3. Data-data yang diperoleh mengenai nasionalisasi perusahaan listrik O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung tahun 1959 kemudian diolah untuk mendapatkan hasil dan pembahasan terkait masalah yang diteliti.
4. Penyimpulan data berdasarkan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika usaha perekonomian di Indonesia memasuki masa industri, sumber tenaga untuk menggerakkan mesin menjadi penting. Pada awalnya sumber penggerak mesin industri memanfaatkan kincir angin dan tenaga uap. Bersamaan dengan penemuan sumber energi yang lebih maju dan bervariasi, pemanfaatan sumber tenaga listrik pun mulai diusahakan. Awalnya pemanfaatan tenaga listrik diperkirakan bersamaan dengan didirikannya industri gula sekitar abad ke-19. Pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai diberlakukan setelah dikeluarkannya *Ordonansi* pada 13 September 1890 (*Staatsblad* tahun 1890 nomor 190), kemudian diubah dengan *Ordonansi* 8 Februari 1934 (*Staatsblad* 1934 nomor 63) (M.D. Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1993: 205). Dengan adanya peraturan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk mendirikan perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Secara umum kelistrikan di Indonesia sudah dikembangkan pada tahun 1897. Perusahaan listrik pertama didirikan di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir, diberi nama *Nederland Indische Electriciteit Maatschappij* atau disingkat N.I.E.M.. Hampir 120 perizinan diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk berbagai pengelolaan kelistrikan di hampir 325 tempat di Indonesia.

Perizinan tersebut meliputi 200 untuk Pulau Jawa, 60 untuk Sumatera, 30 untuk Sulawesi, 122 untuk Kalimantan, dan selebihnya untuk tempat lain (Djiteng Marsudi, dkk., 1994: 16). Tahun pemberian izin konsesi di kota-kota besar yang ada, diantaranya Medan tahun 1899, Bandung tahun 1906, Surabaya tahun 1909, Surakarta tahun 1920 dan Banjarmasin tahun 1922. N.I.E.M. tercatat sebagai perusahaan pertama yang menjual tenaga listrik untuk umum pada Mei 1897. Kemudian N.I.E.M. diambil alih oleh *Nederland Indische Gas Maatschappij* (N.I.G.M.) pada tahun 1925, yang memberikan pelayanannya di kota Batavia, Medan, Palembang, Makassar dan Manado (M.D. Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1993: 206).

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* 1927 nomor 419 membentuk *s'Lands Waterkracht Berdijven* (LWB), yakni perusahaan tenaga listrik milik pemerintah yang mengelola pusat pembangkit tenaga listrik dan tenaga uap (M.D. Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1993: 206). Letak pusat pembangkit tersebut antara lain di pusat tenaga air Plengan, Lamajan, Bengkok-Dago, Ubrug, Kracak, Giringan, Tes, Tonsea Lama dan pusat tenaga uap di Batavia. Pemerintah kolonial juga membentuk lembaga bernama *Dienst voor Waterkracht en Electriciteitwezen* sebagai pengawas pelaksanaan syarat-syarat konsesi, pengendalian tarif listrik dan proses permohonan izin usaha listrik untuk kepentingan umum. Lembaga tersebut berada di bawah naungan *Department van Verkeer en Waterstaat* yang dibentuk pada 1917 (*Staatsblad* tahun 1917 nomor 497).

Keberadaan perusahaan-perusahaan listrik di Indonesia pada awal abad ke-20-an tidak dapat dipisahkan oleh adanya liberalisasi ekonomi yang mulai muncul sejak diundangkannya Undang-undang Agraria Tahun 1870. Undang-undang tersebut menjadi salah satu pembuka dibebaskannya modal swasta asing untuk dapat diinvestasikan di Indonesia. Sebagian besar modal asing itu diinvestasikan pada sektor perkebunan, perdagangan, dan industri. Pada 1900 saja, jumlah investasi modal asing di Indonesia cenderung terus meningkat. Jumlah investasi asing di tahun itu mencapai US \$

318 juta, dan pada tahun 1937 meningkat menjadi US \$ 2.264 juta (Hal Hill dalam Purnawan Basundoro, 2009: 92). Investasi di sektor industri gula, perkebunan karet, pertanian jenis lain, pertambangan, pengangkutan dan sarana umum sebesar 98%, sementara 2% sisanya investasi ditanam pada sektor manufaktur. Kecilnya jumlah investasi di sektor manufaktur disebabkan karena pada awalnya sektor tersebut hanya difungsikan sebagai pelengkap dari sektor perkebunan, terutama pada industri gula. Belanda tercatat sebagai pemegang utama investasi asing dibanding investor asing dari negara lainnya. Pada awal pecahnya perang dunia ke-II, Belanda memiliki pangsa investasi langsung sekitar 63%, selanjutnya Inggris sekitar 14%, Cina 11%, dan Amerika Serikat sekitar 7% (Purnawan Basundoro, 2009: 92). Data lengkap mencakup keseluruhan investasi asing di Indonesia pada masa kolonial kurang memadai.

Dari catatan keseluruhan investasi asing di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, jumlah investasi yang ditanam pada sektor listrik dan gas diperkirakan hanya berkisar 0,2%. Perkiraan tersebut didasarkan pada data yang ditemukan pada masa pasca kemerdekaan, terutama pada 1950-an. Karena mengingat pada masa pasca kemerdekaan hampir tidak ada pembangunan pembangkit baru serta pemasangan instalasi baru, atau justru malah lebih besar sebab pada periode kemerdekaan banyak dari pembangkit serta instalasi listrik dan gas dalam kondisi rusak parah akibat peperangan. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang kelistrikan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan investasi pada sektor perkebunan dan pertambangan.

Penyediaan akan kebutuhan listrik semakin ditingkatkan di tahun 1926 oleh sebuah perusahaan industri milik van Swaay bersaudara yang diberi nama *N.V. Industriele Maatschappij Gebroeder van Swaay* (Perusahaan Industri van Swaay Bersaudara). Selama perkembangannya, perusahaan tersebut membangun pusat tenaga listrik, salah satunya di Palembang, yakni tenaga listrik dengan pembangkit listrik turbin gas. Kelistrikan di Kota Tandjungkarang-Telukbetung sendiri bermula ketika

perusahaan gas dan minyak bumi milik Belanda di Palembang mendirikan perusahaan listrik bernama *N.V. Nederland Indische Gas en Electriciteit Maatschappij* yang disingkat N.V. N.I.G.E.M. di tahun 1924. Perusahaan listrik tersebut memiliki mesin pembangkit tenaga diesel merk *Sulzer* buatan Winterthur, Swiss sebanyak 2 unit yang mulai dioperasikan pada tahun 1927 (<http://palembangdalamsktesa.blogspot.com/2012/05/gedunglistrikO.G.E.M.palembang.html>, 14 Desember 2012, 08:20).

Gedung Listrik N.I.G.E.M. di Palembang ini terletak di bagian timur Benteng Kuto Besak yang menyalurkan 1.200 kW daya listrik untuk kawasan seputaran Palembang, baik di kawasan Talang Kerangga (Kawasan Kolonial), kawasan Dempo, kawasan Tengkuruk dan Talang Jawa. Lalu dengan berkembangnya perusahaan listrik tersebut, N.I.G.E.M. mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan anak perusahaan ke wilayah-wilayah sekitar Sumatera Selatan (termasuk Lampung), Jambi, Bengkulu (Sumatera Bagian Selatan) dengan menerapkan kebijakan desentralisasi produksi dan pemasaran. Dengan demikian, maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri di berbagai wilayah.

Di Lampung perusahaan listrik dikembangkan di Tandjungkarang yang difungsikan sebagai kantor pemasaran dan Telukbetung sebagai tempat pembangkit listrik tenaga diesel sekitar tahun 1927 dan mulai dioperasikan tahun 1929. Untuk izin usaha perusahaan listrik di Tandjungkarang-Telukbetung belum/tidak ditemukan. Mesin pembangkit tenaga gas listrik yang digunakan yaitu mesin jenis *SLM Winthertour 6 DN* sebanyak 2 unit dengan daya terpasang 180 kW, kemudian ditambah dengan mesin *KLM Winthertour 6 DN* dengan daya terpasang 400 kW yang mulai dioperasikan 1939, Lahat tahun 1931, Baturaja dan Bengkulu 1931 (<http://palembangdalamsktesa.blogspot.com/2012/05/gedunglistrikO.G.E.M.palembang.html>, 14 Desember 2012, 08:20). Sebelum pecah perang dunia II N.V.N.I.G.E.M. berubah namanya menjadi *N.V. Overzeeche Gas En Electriciteit Maatschappij* yang di singkat N.V.O.G.E.M., daerah kerjanya tidak berubah dengan pusat

perusahaannya berada di Jalan Heemraadssingel 226, Amsterdam, Belanda (wawancara dengan Sumaini T.B, di Teluk Betung Utara, 14 Maret 2013, 16:00).

Pada masa pecah perang dunia II tentara Jepang banyak mendapat kemenangan dalam peperangan di Asia termasuk Indonesia yang dapat dikuasai. Berbagai sarana vital yang sebelumnya dikelola oleh investor Belanda, tidak luput diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Salah satunya yang dikuasai yakni perusahaan listrik O.G.E.M..Sistem kelistrikan yang sebelumnya cukup efektif kinerjanya harus terputus karena pendudukan tentara Jepang pada 1942. Dengan demikian perusahaan listrik di Sumatera Selatan (termasuk Lampung), Jambi, Bengkulu (dikenal dengan Sumatera Bagian Selatan) dikuasai oleh Jepang. Urusan kelistrikan di wilayah tersebut kemudian ditangani oleh lembaga bernama *Denki Kyoky* yang dikuasai oleh Angkatan Laut (Kai Gun) (Djiteng Marsudi, dkk, 1994: 17).

Denki Kyoky tidak bertahan lama sebab Jepang menyerah ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika. Selama dikuasai oleh Jepang kelistrikan di daerah Sumatera Bagian Selatan tidak mengalami perkembangan, kecuali di Tandjungkarang. Karena sentral pembangkit listrik yang diledakan Belanda dapat diperbaiki oleh Jepang. Selain mesin-mesin diperbaiki, Jepang melakukan pemendaman terhadap mesin-mesin pembangkit listrik yang ada di Telukbetung, dan membiarkan cerobong-cerobong sebagai gas pembuang mengarah ke permukaan tanah (wawancara dengan Wagiman, di Teluk Betung Barat, 11 Maret 2013, 10:00). Hal tersebut dilakukan beberapa waktu sebelum terjadinya pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki, dikarenakan kekhawatiran Jepang terhadap kedatangan Belanda kembali ke perusahaan listrik Telukbetung.

Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memperoleh kemerdekaan, para pekerja yang bekerja di *Denki Kyoky* berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelolaan listrik tersebut dan mencoba mengambil alih pengelolaannya. Dengan dibantu oleh Pembantu Keamanan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh Baheram,

didudukilah induk tenaga listrik di Telukbetung (DHD Angkatan '45, 1994: 140). Secara umum, pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai listrik dan gas yang diketuai oleh Kobarsih menghadap pimpinan KNIP yang pada saat itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Kemudian delegasi Kobarsih bersama dengan pimpinan KNIP menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber kekacauan, maka pada 27 Oktober 1945 pemerintah yang pada saat itu berpusat di Jogjakarta, mengeluarkan surat ketetapan No.1 tahun 1945 tentang pembentukan Jawatan Listrik dan Gas Bumi di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang tugasnya mengelola kelistrikan di Indonesia yang baru saja merdeka. Selain itu pula dikeluarkan SK oleh Menteri PU No.As. 702 tanggal 21 Desember 1946 tentang gaji pokok yang diterima oleh para pegawai listrik disetarakan dengan gaji pegawai negeri. Usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan mudah, selain disebabkan oleh status kepemilikan pembangkit-pembangkit listrik yang belum jelas, juga karena minimnya pengalaman pemerintah di bidang kelistrikan.

Beberapa waktu setelah Indonesia merdeka, Belanda kembali datang ke Indonesia dan mengumumkan peperangan dalam upayanya untuk merebut kembali Indonesia. Belanda merasa tidak rela untuk melepaskan Indonesia, dan melancarkan agresi I dan II. Akhirnya setelah agresi II yang dilancarkan Belanda di Lampung, pihak Belanda pun kembali menduduki sarana vital yang sebelum diduduki oleh Jepang dikelola oleh Belanda, yakni salah satunya N.V. O.G.E.M. Tandjungkarang-Telukbetung diambil alih kembali oleh pihak Belanda, dan mulai dipimpin oleh Tuan Schreuder tahun 1950 (wawancara dengan Wagiman, di Teluk Betung Barat, 11 Maret 2013, 10:00). Berikut ini merupakan susunan personalia setelah perusahaan listrik di Tandjungkarang-Telukbetung kembali diambil alih oleh pihak Belanda tahun 1950, yakni:

Tabel 1. Susunan Personalia

No.	Nama	Jabatan
1	Schreuder	Pemimpin Jawatan Listrik dan Gas di Tandjungkarang-Telukbetung
2	Ali Toha	Bagian Masinis
3	Sumaini T.B.	Sekretaris
4	M. Tohir Nuh	Staf Tata Usaha
5	Mukri & Sukadis	Seksi Operator Regu A
6	Entong, Alek, Achmad	Seksi Operator Regu B
7	Zainul, Suparman, M. Saleh, Jumar	Seksi Operator Regu C
8	Ismail, Mardi, Wasito, M. Yahya, A. Razak	Seksi Operator Regu D
9	M. Mansyur	Seksi Kendaraan
10	Sujono	Bengkel Listrik
11	Subandi & M. Nur	Bengkel Bubut
12	Jasuta	Bengkel Cor
13	Sadimin	Sopir
14	Mad Dawari, Tumirun, Lagis	Keamanan

Sumber: Wawancara dengan Wagiman, di Teluk Betung Barat, 11 Maret 2013, 10:00

Pada tahun 1953 setelah tiga tahun pengambilalihan perusahaan listrik oleh Belanda, pertumbuhan kapasitas yang terpasang dan produksi mengalami laju pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2% per tahun, hal ini memungkinkan dicapainya peningkatan produksi sebesar dua kali lipat setiap sepuluh tahun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan di tahun 1945. Persentase konsumsi di tahun 1953 mencapai 80% dari seluruh produksi (Sumber catatan pertumbuhan kapasitas terpasang oleh PLN).

Setelah Indonesia mencapai pengakuan kedaulatan dari Belanda tahun 1949, pengaruh dari adanya penanaman modal asing tidak banyak mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia terikat oleh komitmen yang tercantum dalam ketetapan KMB, yakni keharusan pemerintah menghormati legalitas keberadaan

perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan Belanda. Secara umum hal demikian dirasa menjadi penghambat bagi terwujudnya kedaulatan nasional secara utuh, terutama di bidang ekonomi.

Dari rapat KMB di Den Haag tahun 1949 meskipun menghasilkan suatu keputusan yang intinya menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan penyerahan kedaulatan dari Belanda. Akan tetapi, masalah penyerahan Irian Barat menjadi masalah tersendiri yang disepakati akan dirundingkan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun terhitung setelah konferensi berlangsung. Kondisi demikian memunculkan keseragaman kepentingan bagi seluruh pemimpin Indonesia sepanjang dasawarsa 1950-an.

Di tengah-tengah sentimen anti-modal asing yang sangat tinggi, berbagai keputusan dari beberapa perusahaan asing yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan menanggapi dengan sikap negatif. Hal tersebut melanda perusahaan listrik yang akan menaikkan tarif listrik mulai 1 Agustus 1950 hingga mencapai 115% (Purnawan Basundoro, 2009: 103). Keputusan demikian tidak hanya direaksi oleh masyarakat dengan dibentuknya “Panitia Penurunan Tarif Listrik”, namun juga direaksi oleh pemerintah dan anggota parlemen. Pemerintah hanya mengizinkan kenaikan tarif sebesar 58%, hanya separuh dari kenaikan tarif yang diajukan. Bila hal tersebut disetujui, maka para pelanggan akan merasa diberatkan.

Pada sidang parlemen yang dilaksanakan Desember 1950 dengan agenda menanggapi berbagai persoalan kelistrikan di Indonesia, terutama terkait kenaikan tarif listrik, sudah pasti sebagian besar peserta sidang menolak hal tersebut. Dalam kesempatan sidang, salah satu peserta sidang dari perwakilan buruh bernama Kobarsih mengajukan mosi agar perusahaan-perusahaan listrik milik Belanda di Indonesia dinasionalisasi dalam waktu sesegera mungkin. Mosi ini mendapat dukungan mutlak dari peserta sidang dengan 120 suara setuju, dan 19 suara menolak (Purnawan Basundoro, 2009: 108). Mosi tersebut diterima oleh pemerintah dengan aklamasi oleh sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa

konsesi yang diberikan perusahaan listrik Belanda dan mendapat dukungan penuh dari serikat-serikat buruh listrik di tingkat daerah terutama di area O.G.E.M. yang terorganisir dalam Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI), yang diketuai oleh Soedarto dengan anggota mencapai 200 pegawai O.G.E.M. Tandjungkarang-Telukbetung (wawancara dengan Sumaini T.B., di Teluk Betung Utara, 14 Maret 2013, 16:00).

Menanggapi kencangnya usulan nasionalisasi perusahaan listrik, maka pada 1953 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik yang diketuai oleh Putuhena dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga (Purnawan Basundoro, 2009: 109). Panitia tersebut bertugas untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar menasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik swasta. Lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada 3 Oktober 1953 mengeluarkan Surat Keputusan No.U.16/7/5 tentang kekuasaan melaksanakan pengoperan perusahaan-perusahaan listrik partikelir. Di tahun yang sama dikeluarkan pula Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1953 tentang nasionalisasi semua perusahaan listrik di seluruh Indonesia (Purnawan Basundoro, 2001: 110). Dengan adanya dua surat keputusan tersebut menjadi landasan awal proses nasionalisasi O.G.E.M. yang termasuk dalam lingkup surat keputusan tersebut. Dalam rapat yang dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga pada 29-30 September 1954, menghasilkan keputusan pembentukan semacam dewan pimpinan perusahaan listrik yang akan bertugas menjalankan perusahaan pasca nasionalisasi.

Agar pelaksanaan nasionalisasi berjalan lebih efektif untuk mencapai tujuannya, maka dengan Keppres No.15 tahun 1955 tanggal 27 Januari 1955 dibentuk Panitia Negara Pertimbangan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas yang telah habis konsesinya dan disusul dengan keputusan Menteri PUT No. Bpu. 16/7/13 tanggal 30 November 1955 tentang pembentukan Panitia Kerja Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas yang terdiri atas 3 anggota, masing-masing dari Departemen PUT, Direktorat Jenderal Tenaga

dan Departemen Keuangan, dengan tugasnya; a) menyusun daftar perusahaan-perusahaan yang belum dinasionalisasi lengkap dengan data konsesinya, b) menyusun daftar harga sisa dari perusahaan-perusahaan pada tiap akhir tahun sejak 1955 menurut aturan konsesi, c) menyusun rencana kerja mengenai penyelesaian nasionalisasi dengan kemungkinan-kemungkinan keuangan, dan d) mengajukan rencana itu kepada Panitia Negara Pertimbangan Nasionalisasi (Djiteng Marsudi, 1994: 33).

Perubahan status kepemilikan perusahaan listrik ke tangan bangsa Indonesia secara resmi diawali di Ambon terhadap perusahaan N.V. E.M.A. pada 1 Oktober 1953, N.V. O.G.E.M. di Jakarta, Tangerang, Cirebon, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan 1 Januari 1954, N.V. A.N.I.E.M. Jawa Tengah-Jawa Timur pada 1 November 1954 (Djiteng Marsudi, 1994: 33). Kemudian menyusul pengoperan perusahaan-perusahaan listrik Belanda lainnya, termasuk O.G.E.M. Tandjungkarang-Telukbetung. Sebelum nasionalisasi O.G.E.M. diresmikan, diadakan suatu konferensi daerah Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI) di Sumatera Selatan pada 15-16 September 1956, yang secara bersama-sama menemui pimpinan jawatan listrik di Palembang yakni Kusuma R.W.S.. Untuk wilayah Tandjungkarang-Telukbetung diwakili oleh Soedarto selaku ketua SBLGI O.G.E.M. Tandjungkarang-Telukbetung. Dari konferensi tersebut menghasilkan tiga keputusan, yakni: 1) Memperkuat keputusan Kongres SBLGI pada tanggal 25/27 Februari 1956 di Surakarta mengenai nasionalisasi perusahaan listrik dan gas seluruh Indonesia. 2) Mendesak pemerintah agar dapat secepatnya melakukan nasionalisasi perusahaan secara sekaligus dan selekas mungkin. 3) Apabila dalam pelaksanaan nasionalisasi pemerintah senantiasa mengundur-undur dan ragu-ragu, maka SBLGI akan mengambil tindakan (Resolusi SBLGI Sumsel, 16 September 1956).

Untuk kelancaran nasionalisasi, melalui surat keputusan Menteri PUT No. Sekr. 16/3/23 tanggal 22 Maret 1958 jo. Peraturan P.25/45/17 tanggal 23 Mei 1958 dibentuk Penguasa Perusahaan-perusahaan

Listrik & Gas (P3LG) di pusat yakni Jakarta, dengan pemimpinnya Ir. Srigati Santoso. Lalu pada 1958, secara resmi pihak tentara menyerahkan perusahaan listrik yang dikelola sementara kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts/Pe.Per.Pu. 11/06/1958, dan keputusan tersebut diberlakukan bagi perusahaan listrik di tiap wilayah eksploitasi, terutama Palembang yang menjadi kantor wilayah eksploitasi di Sumatera bagian selatan. Keputusan yang diterima kemudian diteruskan ke tiap-tiap cabang/anak perusahaan atas intruksi Kusuma R.W.S. selaku pimpinan perusahaan listrik Palembang. Salah satu yang mendapat intruksi adalah perusahaan listrik di Tandjungkarang-Telukbetung. Dengan adanya intruksi tersebut secara resmi kepemimpinan perusahaan listrik Tandjungkarang digantikan oleh Nasehat sebagai pemimpin dari kalangan pribumi menggantikan Handrick Landsman, sementara perusahaan listrik Telukbetung sebagai tempat pembangkit tenaga diesel yang sebelumnya dipimpin oleh Mr. Rah Moon digantikan oleh Bakri (wawancara dengan Sumaini T.B., di Teluk Betung Utara, 14 Maret 2013, 16:00). Kemudian penjelasan rinci tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ditetapkan secara resmi dalam Lembar Negara Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1959, No. 1763 Tahun 1959. Sebelum diberlakukannya undang-undang yang mengatur nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1958, pengambilalihan milik asing di Indonesia secara hukum diatur dalam *Onteigeningsordonnantie* (peraturan penyitaan hak milik) yang dikeluarkan tahun 1920.

Pada perkembangan selanjutnya, O.G.E.M. Tandjungkarang-Telukbetung dalam pengawasannya diserahkan langsung ke Perusahaan Listrik dan Gas (PLG) di

Sumatera Selatan, selanjutnya dikeluarkan lagi ketetapan pemerintah No.16 tahun 1959. Kemudian setelah mengalami beberapa perubahan susunan organisasi, maka PLG dipindahkan kepengurusannya pada Perusahaan Listrik Negara Djakarta (PLND) yang termuat dalam ketetapan No.Ment.I/U/24 tertanggal 16 Juni 1959 oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pada 6 Juni 1960, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengeluarkan ketetapan No.Ment.16/4/10 tanggal 6 Juni 1960 yang memuat tentang susunan manajemen dan organisasi dalam tubuh PLND. Dilakukanlah pembentukan Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi II dengan wilayah kerjanya meliputi Sumatera Selatan (termasuk Lampung dan Bengkulu), dan Sumatera Tengah, yaitu Riau, kecuali Djambi yang masih dipegang oleh Pemerintah setempat.

Pada awal tahun 1965 diadakan pemisahan wilayah eksploitasi II yang dibagi menjadi dua, yaitu: 1) PLN daerah Eksploitasi II, meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, bersamaan juga dengan diserahkannya Perusahaan Listrik Jambi oleh Pemerintah Kotamadya Jambi kepada PLN Eksploitasi II yang berkedudukan di Palembang, 2) PLN daerah Eksploitasi XIV (sekarang wilayah 3) meliputi Sumatera Tengah dan Riau yang berkedudukan di Padang (Sumiyatno, 1991: 5).

Kantor cabang/sektor PLN Eksploitasi II yang berkedudukan di Palembang tersebut tidak mengalami perubahan setelah nasionalisasi, hanya mengalami penambahan untuk kantor sektornya di Tandjung Enim. Cabang Tandjungkarang sendiri tetap membawahi kantor cabang PLTD Telukbetung, PLTD Tarahan, rumah jaga Natar, dan sub ranting Tanjung Bintang, dengan penambahan kantor ranting dan sub ranting, sebagai berikut:

Tabel 2. Cakupan Wilayah Kerja Ranting/Sub Ranting di Lampung (1965)

No.	Ranting	Sub Ranting
1.	Metro	Sekampung, Sribawono, Way Jepara, Batang Hari, Jabung, Bandarjaya, Bangunrejo, Kalirejo, Seputih Banyak, Seputih Surabaya, Rumah Jaga Trimorejo.
2.	Kota Bumi	Bukit Kemuning, Sumber Jaya, Kenali, Liwa,

		Krui, Baradatu, Blambangan Umpu, Menggala, Bumi Agung Marga, Pulung Kencana.
3.	Talang Padang	Kota Agung, Wonosobo, Pringsewu, Gedong Tataan, Kedodong, Pardasuka, Puih Doh.
4.	Kalianda	Sidomulyo, Rumah Jaga Babatan, Padang Cermin.

Sumber: Sumiyatno, 1991: 14-15

Perusahaan listrik ini dari masa pengambilalihan oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang telah beberapa kali berganti departemen yang membawahnya, kondisi demikian terjadi karena berusaha menyesuaikan situasi politik negara. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 tahun 1972, Perusahaan Listrik Negara ini statusnya ditegaskan menjadi PLN Eksploitasi IV berkedudukan di Palembang sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pekerjaan Umum dan Listrik No.01/PRP/73.

Pasca nasionalisasi perusahaan listrik di Tandangkarang-Telukbetung, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan. Untuk kantor perusahaan listrik di Tandangkarang

dipimpin oleh Nasehat (1958-1959), Salmon (1959-1963), Ir. Marah Tulis (1963-1968), Ali Bosar Rambe Bee (1968-1974), Ir. Sunarko (1974-1980), dan untuk kantor perusahaan listrik di Telukbetung dipimpin oleh Bakri (1958-1965), dan Ali Toha (1965-1972), dengan personalia yang sama seperti pada tahun 1950 (wawancara dengan M. Syarif, di Teluk Betung Selatan, 25 Maret 2013, 11:00).

Untuk perkiraan harga, biaya real dan subsidi efektif yang disalurkan oleh perusahaan listrik di Tandangkarang-Telukbetung kepada konsumen dalam berbagai golongan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkiraan Harga, Biaya Real dan Subsidi Efektif untuk Berbagai Golongan Konsumen (1969)

Golongan Konsumen	Harga yang diperkirakan (Rp/kWh)	Biaya yang diperkirakan (Rp/kWh)	Subsidi Efektif (Rp/kWh)	Konsumsi Tahunan (kWh)	Subsidi Efektif Total/th (Rp)
Rumah Tangga Kecil	3,9	13,3 – 17,8	9,4 – 13,9	660	6.200 – 9.170
Rumah Tangga Menengah	7,9	13,3 – 17,3	5,4 – 9,9	1.440	7.780 – 14.260
Rumah Tangga Besar	9,2	13,3 – 17,8	4,1 – 8,6	5.880	24.110 – 50.570
Industri	8,5	8,6 – 10,8	0,1 – 2,3	21.600	2.160 – 4.970
Komersiil Besar	18,6	13,3 – 17,8	0,8 – 5,3	9.120	7.300 – 48.340
Lembaga Pemerintahan	8,9	13,3 – 17,8	4,4 – 8,9	10.440	45.940 – 92.920

Sumber: Berdasarkan data yang diberikan PLN.

Keberhasilan pemerintah Indonesia mengoper sebuah instansi yang amat vital dan menentukan hampir semua sendi kehidupan diperkotaan, yakni perusahaan listrik, merupakan salah satu pintu masuk menuju terwujudnya kelistrikan nasional yang tidak tergantung pada perusahaan asing. Dengan

status baru sistem kelistrikan yang dikelola oleh bangsa sendiri, maka sudah semestinya kinerja yang diberikan harus lebih ditingkatkan, baik dalam bidang pelayanan, pendistribusian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kelistrikan tersebut. Listrik juga sudah semestinya bisa dinikmati oleh

semua golongan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Namun upaya tersebut pada kenyataannya bukan hal yang mudah untuk diterapkan. Banyak kendala dan juga hal-hal penting yang patut diperhitungkan. Hingga tahun 1980-an misalnya, belum semua warga dapat menikmati pendistribusian listrik tersebut. Sebagian besar energi listrik masih dinikmati oleh warga kota, dan keadaan itu berbanding terbalik bagi warga pedesaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa latar belakang dari nasionalisasi perusahaan listrik milik swasta Belanda yang ada di Indonesia, khususnya di Tandjungkarang-Telukbetung, tidak lain adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang fundamental, yakni struktur ekonomi nasional yang beragam dan stabil, suatu perekonomian yang berkembang makmur dan mewujudkan perekonomian yang dikelola langsung oleh pribumi, yang berarti dominasi ekonomi asing seperti halnya Belanda yang dialihkan kepada orang-orang Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dari keutuhan negara Indonesia yang merdeka dan bebas dari dominasi asing, termasuk salah satunya dalam bidang perekonomian. Selain itu juga, nasionalisasi menjadi wujud dari perlawanan Indonesia terhadap Belanda dalam mempertahankan kedaulatan RI, khususnya kasus Irian Barat.

Aksi pengambilalihan perusahaan listrik pun diwarnai dengan semangat para buruh listrik yang tergabung dalam Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBLGI) yang dipimpin oleh Soedarto dan anggotanya terdiri dari para pekerja listrik sendiri. Semangat nasionalisasi pun semakin meningkat ketika Kobarsih menyuarakan aspirasinya dalam sidang parlemen di pusat. Menanggapi kencangnya usulan nasionalisasi, maka pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik pada 1953 dan disusul dengan dikeluarkannya SK No. U.16/7/5 tentang kekuasaan pengoperan perusahaan-perusahaan listrik partikelir dan pada tahun yang sama dikeluarkan SK Presiden RI No. 163 tahun 1953 tentang

nasionalisasi semua perusahaan listrik di seluruh Indonesia. Dua surat keputusan tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan awal proses nasionalisasi O.G.E.M. yang termasuk dalam lingkup surat tersebut.

Pada kelanjutan nasionalisasi perusahaan listrik berlangsung secara damai, terarah dan teratur, tanpa adanya keputusan yang berat sebelah antara kedua belah pihak setelah Soedarto, beserta perwakilan dari beberapa anak perusahaan yang kantor wilayahnya terdapat di Palembang, menghadap pada pimpinan Kusuma R.W.S. terkait agar segera dilakukan nasionalisasi perusahaan listrik dari pihak Belanda. Terbukti dengan adanya pengesahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 68 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya ketetapan pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, dilanjutkan dengan ketetapan pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang pembentukan badan nasionalisasi perusahaan Belanda (Banas). Banas sendiri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, untuk mencegah munculnya kesimpangsiuran dalam upaya nasionalisasi.

Pasca nasionalisasi, setelah mendapat intruksi dari Kusuma R.W.S. secara resmi kepemimpinan perusahaan listrik Tandjungkarang digantikan oleh Nasehat sebagai pemimpin dari kalangan pribumi menggantikan Handrick Landsman, sementara perusahaan listrik Telukbetung sebagai tempat pembangkit tenaga diesel yang sebelumnya dipimpin oleh Mr. Rah Moon digantikan oleh Bakri. Pemerintah pusat juga membentuk panitia penetapan ganti kerugian yang tugasnya memeriksa seperlunya keadaan perusahaan Belanda yang akan dinasionalisasi, ketentuannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1959, dan ketetapan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan atau gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi, termasuk salah satunya N.V. O.G.E.M. di Tandjungkarang-Telukbetung. Sejak pengambilalihan PLN mengalami perkembangan yang pesat sampai bisa kita rasakan hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman, Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Jakarta: Ombak. 297 halaman.
- Djoened, Marwati Puspongoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia V (Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda)*. Jakarta: Balai Pustaka. 358 halaman.
- Dewan Harian Daerah Angkatan '45. 1994. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung (Buku I)*. Bandar Lampung: CV. Mataram. 500 halaman.
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 141 halaman.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 506 halaman.
- Gostchalk, Louis. 1984. *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 225 halaman.
- Marsudi, Djiteng, dkk.. 1994. *50 Tahun Pengabdian PLN*. Jakarta: PLN. 351 Halaman.
- Moloeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali. 210 halaman.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 249 halaman.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 544 halaman.
- Ricklefs, M.C..1991. *Sejarah Indonesia Modern (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 501 halaman.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 210 halaman.
- Sumiyatno.1991. *Hasil Praktek Kerja Lapangan Pada PLN Wil. IV Cabang Tanjung Karang (Tugas Akhir, tidak dipublikasikan)*. Bandar Lampung: STM Muhammadiyah. 34 halaman.
- Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 201 halaman.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 236 halaman.

Sumber-sumber Lain

Blog Dedi Nursyah P..

<http://palembangdalamsketsa.blogspot.com/2012/05/gedung-listrik-ogem-palembang.html> diakses tanggal 14 Desember 2012, Pukul 08.20 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara diakses tanggal 14Desember 2012 pukul 09.22 WIB.

Website PT. PLN [Persero].

<http://www.pln.co.id/?p=102>diakses tanggal 14 Desember 2012 pukul 10.55 WIB.

Wawancara

Hj. Sumaini Takarbesi. 81 tahun.

Di Teluk Betung Utara. 14 Maret 2013, 16:00

M. Syarif. 72 tahun. Di Teluk Betung Selatan. 25 Maret 2013, 11:00

Wagiman.67 tahun. Di Teluk Betung Barat. 11 Maret 2013, 10:00